

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua pada penelitian ini berisi penjelasan secara komprehensif tentang referensi pustaka atau teori – teori yang berkaitan dan mendukung penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan) terhadap indeks pembangunan manusia di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2.1. Kajian Teori

Bagian ini memberikan penjelasan tentang pengertian teori – teori yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Terdapat pengertian dan teori yang akan dijelaskan berkaitan dengan pembangunan manusia (Indeks Pembangunan Manusia), pengeluaran pemerintah (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan).

2.1.1. Teori *Human Capital*

Human capital dari segi Bahasa tersusun menjadi dua kata yaitu manusia dan kapital atau modal. Kapital sendiri diartikan sebagai *factor* produksi yang memproses barang maupun jasa tanpa mengsumsi selama proses produksi, sedangkan manusia dalam *human capital* diartikan sebagai bentuk modal yang diibaratkan dalam mesin maupun teknologi. Menurut (Todaro & Smith, n.d.) bahwa *human capital* dapat dilihat melalui seseorang melakukan investasi yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi pada masa mendatang. Investasi ini pada bidang kesehatan dan pendidikan, hal tersebut dapat dijeaskan dengan semakin tingginya pendidikan seseorang maka keterampilan yang dimiliki semakin tinggi juga, sedangkan untuk

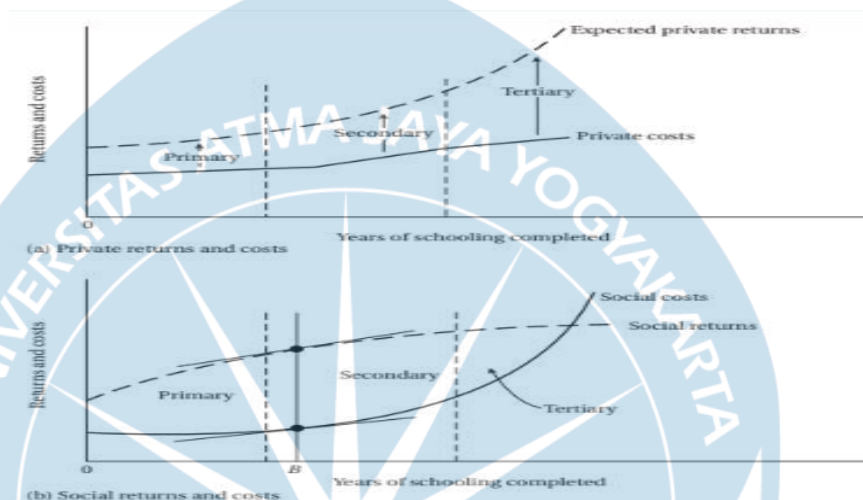
kesehatan memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Pendidikan yang tinggi tanpa mempunyai tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktifitas, selain itu pendidikan yang tinggi juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan. Pendekatan *human capital* berfokus pada kemampuan tidak langsung suatu individu untuk meningkatkan pendapatan. Investasi *human capital* memberikan ilustrasi tentang bagaimana pendapatan bervariasi selama siklus hidup individu dengan berbagai tingkat pendidikan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memulai bekerja di usia lanjut, namun individu yang memiliki tingkat pendidikan yang cepat melampaui mereka yang memulai bekerja lebih awal.

Negara berkembang, biaya Pendidikan negeri memiliki peluang untuk masyarakat secara menyeluruh yang dihasilkan dari kebutuhan untuk membiayai ekspansi pendidikan yang mahal pada tingkat yang tinggi ketika dana terbatas untuk pengalokasiannya mungkin untuk bidang yang lain. Biaya untuk pendidikan swasta yang menanggung pribadinya sendiri dimana peningkatannya melambat bahkan menurun. Gambar 2.1 merupakan ilustrasi perbedaan antara manfaat dan biaya pribadi dan sosial, perbedaan tersebut menyebabkan salah alokasi sumber daya ketika kepentingan pribadi menggantikan kriteria investasi sosial. Ilustrasi pada Gambar 2.1 untuk memaksimalkan perbedaan antara manfaat dan biaya yang diharapkan dengan tingkat swasta beralih ke investasi dalam pendidikan strategi optimal untuk seorang siswa dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Pendidikan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi seperti:

1. Menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan memberinya pengetahuan dan keterampilan yang meningkat.

2. Menyediakan kesempatan kerja dan pendapatan yang luas bagi guru, pekerja sekolah, dan fasilitas.
3. Menyediakan berbagai jenis pelatihan yang akan mempromosikan literasi dan keterampilan.



Sumber: Todaro & Smith, 2011:380.

Gambar 2.1
Manfaat Pribadi vs Sosial dan Biaya Pendidikan.

2.1.2. Teori Adolf Wagner

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan sebuah teori yaitu *organic theory of state* atau teori organisasi yang berasumsi pemerintah sebagai individu yang dapat bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Inti dari teori ini menyatakan bahwa dalam perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, utamanya yang disebabkan oleh hubungan yang muncul dalam masyarakat, pendidikan, hukum, kebudayaan, dan sebagainya. Semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah maka meningkat juga fungsi kesejahteraan, keamanan, perbankan dan pembangunan (Ridwan, 1959).

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Faktor utama dalam reformasi ekonomi dengan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keterampilan. Tingginya kualitas SDM dapat mendorong suatu wilayah semakin maju. Pembangunan manusia sebagai kebebasan nyata yang dapat dinikmati oleh manusia. Suatu kebebasan tergantung dari beberapa faktor sosial ekonomi misalkan akses kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Terdapat konsep tentang *Human Development Index* (HDI) yang dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990, di Indonesia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat Statistik, n.d.). Indeks pembangunan manusia sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM memaparkan bagaimana masyarakat dapat dilihat dari pembangunan dalam mencapai pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam mengukur pendidikan dapat dilihat dari rata – rata lama sekolah, untuk mengukur dimensi kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak dengan indikator daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok dilihat dari besarnya rata – rata pengeluaran per kapita.

Indeks pembangunan manusia memiliki tiga indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pembangunan manusia disuatu wilayah yaitu:

- 1) Tingkat pendidikan atau pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah, dari hal tersebut dapat diperoleh ilustrasi yang lebih relevan mengenai perubahan pendidikan yang terjadi.
- 2) Kesehatan atau harapan hidup dapat dilihat dari umur panjang dan sehat.

3) Standar hidup layak dilihat dari Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita, sebab dapat menggambarkan pendapatan masyarakat di wilayah tertentu.

Menghitung setiap dimensi IPM didasarkan pada nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Dimensi pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots (2.1)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots (2.2)$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + RLS_{min}}{2} \dots\dots\dots (2.3)$$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

di mana:

I = Indeks komponen

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata – rata lama sekolah.

2. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots (2.4)$$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

di mana:

I = Indeks

AHH = Angka harapan hidup

AHH_{min} = Angka harapan hidup minimum

AHH_{maks} = Angka harapan hidup maksimum.

3. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})} \dots\dots\dots (2.5)$$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Menghitung Indeks pembangunan manusia sebagai rata – rata geometrik dari indeks pendidikan, kesehatan dan pengeluaran dapat di formulakan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \dots \dots \dots (2.6)$$

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Komponen yang ada dalam IPM terdapat batas minimum dan maksimum yang terlihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Batas Minimum dan Maksimum Komponen IPM

No.	Komponen IPM	Batas Minimum	Batas Maksimum	Keterangan
1.	Angka harapan hidup (tahun)	25	85	Standar UNDP
2.	Angka melek huruf (persentase)	0	100	Standar UNDP
3.	Angka rata – rata lama sekolah (tahun)	0	15	
4.	Daya beli (Rupiah PPP)	300.000 (1996) 360.000 ^b (1999, dst)	732.720 ^a	Pengeluaran per Kapita per Ril Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Keterangan:

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis baru.

2.1.4. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* yang mengarah pada belanja jasa dan barang oleh pemerintah untuk mendanai kegiatan niaga untuk mewujudkan fungsi demi kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah ini mengacu pada pembelanjaan sektor publik untuk penyediaan layanan seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah.

Faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: pertama, jumlah pajak yang diproyeksikan. Kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah seperti untuk mengatasi masalah pengangguran, inflasi, percepatan pembangunan.

Ketiga, pertimbangan politik dan keamanan hal ini bertujuan untuk perekonomian yang berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan (Hamzah & Musnadi, 2015).

2.1.5. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan suatu langkah pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan perbaikan layanan kesehatan masyarakat merupakan suatu bentuk investasi yang ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Undang-Undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji (Tjodi et al., 2019).

Menurut (Todaro & Smith, n.d.), syarat dalam suatu negara dalam meningkatkan produktifitas masyarakat maka dengan memenuhi salah satu hak dasar berupa mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan merupakan salah satu cara dalam memenuhi hak dasar tersebut.

Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan digunakan untuk mengetahui capaian pada dimensi pertama indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang dapat meningkatkan dimensi kesehatan pada indeks pembangunan manusia seperti peningkatan layanan JKN (Jaminan Kesehatan Negara) seperti kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), peningkatan nutrisi ibu hamil dan menyusui, pembangunan rumah sakit untuk peningkatan pelayanan kesehatan, apabila terpenuhinya subsidi pemerintah

maka akan mampu membuat setiap individu hidup layak dan umur Panjang sesuai dimensi kesehatan di indeks pembangunan manusia.

2.1.6. Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial merupakan pengeluaran berupa barang atau jasa maupun uang yang dianggarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kapasitas kesejahteraan dan perekonomian (Setiawan & Fikriah, 2020). Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk jaminan sosial yang berasal dari APBN, dan jumlah dana dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial seperti raskin, KIP atau Kartu Indonesia Pintar, PKH atau Program Keluarga Harapan, dan KPS atau Kartu Perlindungan Sosial. Adanya program perlindungan sosial tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran sampai ketimpangan yang menunjang indeks pembangunan manusia melalui salah satu dimensi keadaan stantar hidup layak atau keadaan ekonomi. Pengembangan sektor sosial telah dianggap sebagai prasyarat penting untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian, sebab pengembangan sektor sosial meningkatkan peluang kerja, tingkat pendapatan, pertumbuhan produktivitas, kemajuan teknologi dan karenanya membantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia(Ikbal, 2021).

2.1.7. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan sebagai salah satu faktor yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk

bidang pendidikan dapat memberikan pendidikan yang layak. Hal tersebut merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah berguna untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pemerintah memprioritaskan pendidikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan pembangunan nasional (Winarti, 2014).

Menurut (Putra, 2019) pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dapat diaokasikan dalam wujud infrastruktur maupun sarana dan prasarana Pendidikan. Pengeluaran tersebut dapat digunakan untuk peayanan pendidikan seluruh masyarakat Indonsia secara merata. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan besarnya pengeluaran belanja untuk pendidikan termasuk gaji yang dialokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan (Badan Pusat Statistik, n.d.). Pengoptimalan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memberikan pengaruh pada meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, dan mendorong individu dalam menggunakan ilmu yang didapat dari pendidikan dituangkan saat bekerja sehingga dapat meningkatkan standar perekonomian. Produktifitas dalam suatu negara dapat meningkatkan jika pemerintah dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat (Todaro & Smith, n.d.).

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan indicator yang dapat mencapai dimensi indeks pembangunan manusia yaitu tingkat pendidikan dan lama sekolah. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang dapat meningkatkan pendidikan ketika pemerataan dan pengoptimalan bantuan oprasional sekolah seperti wajib belajar 12 tahun, maka akan berpengaruh suatu individu memiliki wawsan

pengetahuan dan lama mengenyam pendidikan sesuai dengan *indicator* indeks pembangunan manusia dimensi pendidikan.

2.2. Studi Terkait

Beberapa studi mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan terhadap pembangunan manusia menunjukkan bukti yang beragam. Terdapat sisi yang menjelaskan adanya keterkaitan dan sisi lainnya menjelaskan tidak adanya keterkaitan terhadap pembangunan manusia. Pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial terhadap pembangunan manusia menunjukkan bukti yang beragam. Penelitian yang dilakukan (Hidarini et al., 2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan (Hayati, 2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial berpengaruh terhadap IPM, meskipun hanya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan saja yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengalokasikan lebih banyak anggarannya untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan sumber daya manusianya. dan program perlindungan sosial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan modal manusia dalam hal pencapaian pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan harapan hidup saat lahir. Selain itu, pengeluaran pemerintah dalam negeri untuk kesehatan dan pendidikan, dan program perlindungan sosial secara signifikan menurunkan angka kematian.

Tabel 2. 2
Studi Terkait

Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
(Diba et al., 2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Model analisis regresi linier berganda	Pengeluaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
(Andiny & Sari, 2018)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan/	Analisis regresi linear berganda.	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.
(Mailassa`adah, 2017)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah	Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. IPM.	Data panel dengan menggunakan Random Effect Model	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial berpengaruh positif terhadap IPM.
(Setiawan & Fikriah, 2020)	Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Indeks	Indeks pembangunan manusia (IPM), belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan	Analisis regresi data panel.	Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, pengeluaran

Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
	Pembangunan Manusia.	perlindungan sosial.		pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap Indeks IPM.

